

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Marginalisasi adalah fenomena ketidakseimbangan dalam memperoleh peluang dalam aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan oleh sekumpulan masyarakat. Ialah sumber daripada berbagai faktor yang saling terkait dan kompleks. Akibat dari marginalisasi inilah, masyarakat tersebut menjadi miskin dan berada dalam keadaan serba naif. Masyarakat yang marginal ini mendapat peluang yang terbatas akibat daripada ketidakupayaan mereka dalam beberapa aspek yang akhirnya memberi kesan negative kepada sisi hasil kemajuan negara (Thamrin 2019).

Konsep marginalisasi juga dikaitkan dengan fenomena penyingkiran sosial yang berlaku karena ketidakseimbangan dalam program pembangunan masyarakat dan juga peluang pendidikan yang tidak menyeluruh. Lazimnya masyarakat marginal seringkali dikaitkan dengan kemiskinan dan hidup serba naif. Demi menampung keperluan, mereka mempunyai kecenderungan untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak bermoral, menyalahi etika dan norma, berbagai aktivitas negative seperti terlibat dalam penagihan narkoba, pelacur, mencuri.

Masyarakat marginal adalah suatu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap berbagai aspek atau bidang- bidang yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta. Pada umumnya kaum marginal ini memiliki posisi atau status yang paling rendah dalam masyarakat, proses marginalisasi sama saja dengan proses

pemiskinan. Hal ini dikarenakan tidak diberinya kesempatan kepada pihak yang termarginalkan untuk mengembangkan dirinya (Muammar 2019).

Marginalisasi menyentuh kehidupan masyarakat salah satunya orang suku laut komunitas ini termarginalkan dari kehidupannya, arus modernisasi dan globalisasi yang semakin mencuat membuat komunitas ini tidak bisa mengembangkan dirinya sendiri, pembangunan yang hanya fokus ke satu tujuan saja tidak bisa membuat masyarakat adat yang terkena dampak pembangunan bisa mensejahterakan kehidupannya selanjutnya. Marginalisasi adalah proses menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik di dalam masyarakat yang utuh. Proses ini terutama sebagai konsekuensi dari kemiskinan dan penghasilan yang rendah, tetapi bisa juga dampak dari faktor lain seperti diskriminasi, suku, ras, tingkat pendidikan yang rendah, dan merosotnya kualitas lingkungan.

Dinamika pembangunan yang menjadikan komunitas adat menjadi objek pembangunan telah dikaji selama 30 tahun terakhir (Arizona 2016). Namun perihal ketidakberdayaan masih kerap dialami oleh komunitas adat. Ketidakberdayaan ini membuat mereka menjadi komunitas adat yang marginal dalam kehidupannya. Kondisi ketidakberdayaan komunitas adat karena problematika pembangunan ini sudah banyak terjadi di dunia. Ketidakberdayaan komunitas adat di dunia karena persoalan pembangunan mereka tidak hanya hidup dengan beban diskriminasi yang mereka rasakan, tapi mereka merasa tersingkir dalam akses terhadap tanahnya sendiri dengan kekayaan alamnya. Mereka juga menjadi kelompok masyarakat

yang terasing dari kehidupan budaya, ekonomi dan religi mereka sendiri. Dan secara politik mereka tidak memiliki posisi tawar menawar yang kuat karena ketidakberdayaan. Keprihatinan dunia internasional terhadap masalah komunitas adat terpencil tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh komunitas adat terpencil di seluruh dunia. (Kusuma 2022).

Faktor pertama yang dapat menyebabkan marginalisasi adalah diskriminasi. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi rasial, etnis, agama, gender, atau berdasarkan status sosial dan ekonomi. Kelompok atau individu yang dikenai diskriminasi seringkali diabaikan atau dianggap kurang berharga dalam masyarakat, yang mengarah pada pengecualian mereka dari kesempatan-kesempatan yang sama dengan masyarakat mayoritas. Misalnya, Suku Laut sering mengalami diskriminasi berdasarkan stereotip negatif atau prasangka yang menempatkan mereka pada posisi pinggiran dalam kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Kebijakan pembangunan yang tidak inklusif juga dapat memperburuk marginalisasi. Kebijakan ini mungkin tidak mempertimbangkan keberagaman sosial dan budaya masyarakat, sehingga tidak mampu menanggapi kebutuhan khusus kelompok-kelompok yang rentan terhadap marginalisasi. Misalnya, proyek-proyek infrastruktur besar yang mengubah lingkungan fisik dapat secara langsung mempengaruhi mata pencaharian dan kehidupan tradisional Suku Laut, tanpa mempertimbangkan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam.

Orang Suku laut menjadi komunitas yang marginal di pedesaan maupun di perkotaan marginalisasi yang berarti berhubungan dengan tepi, pinggir, dan batas.

Marginalisasi berarti proses yang menjadikan kelompok tertentu berada pada posisi tepi, terpinggirkan, atau tidak berdaya. Tidak adanya daya kemampuan untuk mengakses ekonominya sehingga terjadi proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak yang termarginalkan. Namun, hak tersebut diabaikan dengan berbagai alasan demi suatu tujuan.

A Rafni et al. 2008 marjinalisasi dan pemberdayaan masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemerintah nagari di Sumatera Barat. Marjinalisasi masyarakat adat ini berupa di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di bidang politik masyarakat adat masih termarginalnya hak-hak perempuan dalam masyarakat adat untuk mencalonkan diri menjadi wali nagari. Di bidang ekonomi masih rendahnya pengetahuan masyarakat adat tentang data base ekonomi berbasis nagari, suku atau kaum. Lalu di bidang sosial budaya pergeseran nilai identitas jati diri hidup bernagari di hampir keseluruhan nagari, dan banyaknya nilai-nilai yang mulai memudar.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ialah marginalisasi yang terjadi di dunia mencakup beberapa bidang yakni politik, sosial budaya, dan gender. Sedangkan peneliti mengkaji marginalisasi masyarakat adat suku laut dalam mengakses pekerjaannya pasca kebijakan pemerintah setelah dirumahkan bahwasanya masyarakat adat menjadi komunitas adat yang marginal karena tidak bisa mengakses pekerjaan yang strategis karena tidak mampu dalam segi pengetahuan mereka terbatas karena kegagalan pendidikan yang mereka rasakan, serta ketidakmampuan skill dalam diri mereka yang masih kurang sehingga komunitas adat ini sulit untuk bisa mengakses pekerjaan seperti masyarakat pada

umumnya, pandangan buruk yang masih melekat pada orang suku laut di paya togok membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan.

Begitupun masyarakat adat di Indonesia menjadi sasaran berbagai program pembangunan, baik dari institusi pemerintah maupun oleh lembaga non pemerintahan. Yang mengantarkan masyarakat adat pada posisi menghadapi banyak tantangan. Salah satu dari banyak tantangan itu adalah program-program pengembangan yang dilakukan sering kali menggunakan pendekatan *top-down* yang mengabaikan kekayaan peradaban masyarakat adat. Akibatnya, pendekatan-pendekatan ini dapat memisahkan masyarakat adat dari pengetahuan maupun asset mereka yang tak ternilai, sehingga mengakibatkan masyarakat adat berdampak marginalisasi pembangunan dalam konteks budaya, sosial dan ekonomi. (Ahriani, & Asrifan 2021). Indonesia dikenal dengan kaya akan beragam suku, agama, budaya, dan ras yang dimiliki setiap warga negaranya. Salah satunya adalah masyarakat adat. Masyarakat adat merujuk pada masyarakat miskin terpencil, serta rentan juga secara sosial dan ekonominya. Masyarakat adat dianggap sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial serta marginal dipedesaan maupun perkotaan, sehingga komunitas ini perlu penanganan khusus agar dapat hidup setara dengan warga negara Indonesia lainnya.

Pada umumnya orang suku laut berprofesi sebagai nelayan yang menjadi mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Awalnya hidup sebagai seorang pengembara, berpindah dari satu tempat ke tempat lain (nomaden) dengan menggunakan pompong yang berfungsi sebagai tempat tinggal mereka, dan sekarang sudah menetap. Pekerjaan ini dianggap lebih mudah bagi mereka karena

kehidupan di dalam laut bukanlah sesuatu yang baru bagi mereka, sehingga tidak memerlukan adaptasi. (Wahyuni & Solina 2021).

Suku laut yang ada di Indonesia atau biasa disebut suku asli yang tinggal di laut dengan kebiasaan mereka yaitu berpindah-pindah nomaden salah satunya adalah suku bajau. Karakteristik yang sama dimiliki masyarakat di Sulawesi Tenggara yaitu suku bajau. Karakteristik suku laut di bajau mengembara (nomaden), Cara hidup Masyarakat Bajau bergantung pada sumber daya laut untuk kelangsungan hidup mereka kebutuhan pangan, papan, penghidupan, dan budaya. (Ariando, Sumolang, & Arumsari 2022)

Menurut Chou (2009), ada banyak sebutan kelompok ini berupa orang laut, suku sampan, orang mantang, orang duano, orang akit, orang sekak, dan lain sebagainya. Saat ini orang suku laut di Kepulauan Riau tersebar di lima kabupaten dengan estimasi terdapat 12.800 jiwa dan 44 lokasi, seperti yang terlihat pada peta di bawah ini yaitu terdapat 5 kabupaten Batam, Bintan, Kep Anambas, Lingga dan Karimun (Arman & Swastiwi 2023)

Orang suku laut sendiri memiliki ciri-ciri secara umum yaitu berupa komunitas adat kecil, tertutup, homogen, kebiasaan sosial yang selalu berdasar pada hubungan kekerabatan, tempat tinggal suku laut yang terpencil sehingga secara geografis sulit untuk dijangkau, suku laut ini juga masih dengan sistem ekonomi pokok/subsisten, peralatan yang digunakan masih sederhana, ketergantungan yang sangat relative tinggi untuk mencari sumber daya alam, dan suku laut sendiri mempunyai keterbatasan terhadap akses pelayanan sosial, ekonomi maupun politik.

Ketidakberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. masyarakat ini

secara materil masih belum mampu mencukupi kebutuhan hidup seperti manusia wajar pada umumnya. mereka mengalami keterbatasan di lingkungan sosialnya baik untuk melakukan sosialisasi, interaksi secara vertikal bahkan untuk menjalin hubungan ke luar dari lingkungannya. mereka secara kultural mendapatkan perlakuan yang tidak setara dalam segmentasi atau struktur sosial. secara politis, mereka juga tidak memiliki peluang untuk melakukan negoisasi terhadap kebijakan diberlakukan di wilayahnya, bahkan kebijakan yang mengintervensi di banyak segi kehidupan mereka sekalipun.

Kebiasaan-kebiasaan orang suku laut yang dahulunya hidup berpindah-pindah sekarang mereka telah dipindahkan kedaratan pada tahun 1980 hingga pada pertengahan 1990an oleh pemerintah untuk tinggal di rumah sederhana yang di bangun melalui RTLH (Rumah Tak Layak Huni) yang pemukiman nya tidak jauh dari habitat awal, dimana mereka tinggal disekitaran bibir pantai dengan model rumah batu yang disediakan oleh pemerintah (Wahyuni and Solina, 2021).

Namun yang sangat disayangkan kebiasaan-kebiasaan dari suku laut mulai menghilang semenjak mereka mulai menetap di rumah tak layak huni (RTLH), yang pada awalnya tempat persinggahan bagi Suku Laut yang terbuat dari kayu, di bangunlah oleh pemerintah menjadi tempat tinggal yang permanen disediakan oleh pemerintah. Kondisi demikian juga menunjang adanya perkawinan antara suku laut dengan masyarakat daratan dan lambat laun kebudayaan dari masyarakat daratan diterima oleh orang suku laut tanpa meninggalkan unsur kebudayaan mereka. (Elsera, 2019).

Kebijakan menginisiasi perumahan Suku Laut sudah mengubah mereka dalam

hal mengakses pekerjaan di tempat baru yaitu di darat. Kebijakan pembangunan suku laut telah berlangsung oleh koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam upayanya untuk mempermudah pendataan dan harapannya yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat suku laut. Ironisnya, inisiatif ini justru membuat suku laut termarginalisasi dalam mengakses pekerjaan di darat. Dengan adanya kebijakan pembangunan ini, suku laut dipaksa bertarung dengan kerasnya hidup sebagai masyarakat lokal yang berorientasi kepada keamanan ekonomi. (Elsera 2019)

Demikian pula yang dialami oleh orang suku laut yang berada di paya togok mereka merasa sulit dalam mendapatkan pekerjaan layaknya yang di dapatkan oleh masyarakat umum karena mereka tidak mempunyai skill dan kemampuan pengetahuan, komunikasi yang baik, untuk bisa mengakses pekerjaan seperti masyarakat pada umumnya, kegagalan pendidikan yang mereka rasakan juga membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan, serta image negatif yang terbangun di masyarakat melebeli suku laut, pengucilan yang terjadi juga dirasakan suku laut ini dikarenakan mereka juga dalam hal berinteraksi kepada masyarakat umum tertutup serta penilaian buruk masyarakat terhadap suku laut masih melekat.

Masyarakat adat suku laut di Paya Togok mereka dipindahkan sejak tahun 2015 dari tempat tinggal mereka yang sebelumnya dekat dengan pesisir kini sudah dirumahkan yaitu di darat, dengan jumlah sebanyak 89 KK. Dengan perpindahan tempat tinggal orang suku laut di tanjungbatu yang awalnya pekerjaan yang biasanya di lakukan nya sebagai mencari sumber mata pencaharian di laut kini mereka melanjutkan pekerjaan di darat bekerja sebagai buruh harian lepas, pemulung, serta ada juga yang masih menjual hasil laut seperti kerang-kerangan

tetapi cara mendapatkannya bukan langsung mencari di laut tetapi membeli dengan agen lalu mereka menjualnya kembali.

Pengaruh letak geografis suku laut yang berubah yang kini dirumahkan yang awalnya di pesisir sekarang berada di tengah-tengah masyarakat umum. Walaupun masih tidak jauh dari pesisir tetapi mereka enggan mencari penghidupan di laut, dan memilih bekerja di darat. Akses terhadap mata pencaharian mereka kemudian terganggu sehingga komunitas ini harus menyesuaikan diri dengan kondisi daratan. Sehingga mereka harus melamar pekerjaan di perusahaan, kemudian mereka harus melamar di pegawai negeri, dan mereka harus bersekolah seperti orang-orang normal pada umum.

Orang suku laut di Paya Togok mereka merasa terhambat dalam sektor ekonominya karena sebuah identitas yang mereka miliki. Karakteristik dari orang suku laut juga yang menjadi faktor mereka sulit mendapatkan pekerjaan, bahwasanya mereka adalah suku yang di kenal dengan wataknya yang keras, serta jorok dalam kehidupannya, serta masih sulit berinteraksi kepada masyarakat umum, selain itu orang suku laut ini pernah melakukan kesalahan dalam profesi kesehariannya, sehingga satu yang melakukan berdampak kesemua komunitas suku laut yang berada di Paya Togok. Dalam pendidikannya orang suku laut di Paya Togok masih rendah bahwasanya mereka tidak mampu dalam membiayai keperluan sekolah yang semakin mahal sehingga orang suku laut di Paya Togok memilih tidak melanjutkan sekolahnya.

Pekerjaan yang di tekuni orang suku laut di Paya Togok tidak lagi beraktivitas di laut seperti dahulunya hanya ada beberapa saja dari mereka yang masih bekerja

sebagai nelayan, kebiasaan-kebiasaan yang biasa mereka lakukan dengan bekerja sebagai nelayan kini telah memudar, dikarenakan tempat mereka mencari mata pencaharian banyak dilakukan pembangunan-pembangunan seperti pembangunan pelabuhan dosmetik, hotel, dan pelabuhan angkut barang sehingga membuat mereka sulit mencari penghasilan di laut lagi, membuat mereka beralih pekerjaan yang awalnya melaut menjadi Pemulung, Buruh Harian Lepas, Pedagang hasil laut, serta Pembuat tikar. Sehingga terjadi kerentanan pada suku laut bahwasanya mereka mengalami penurunan daya kemampuan dalam mengakses pekerjaan di masyarakat lokal pada umumnya. Berdasarkan latar belakang Suku Laut di Tanjungbatu, oleh sebab itu:

Pentingnya penelitian ini yaitu untuk melihat bahwa setelah terjadinya kebijakan pemerintah merumahkan masyarakat suku laut mereka menjadi kelompok masyarakat yang tidak bisa mengakses pekerjaan yang strategis. Dengan demikian peneliti mengangkat judul penelitian dengan judul marginalisasi suku laut dalam mengakses pekerjaan pasca kebijakan pembangunan di kelurahan paya togok kecamatan kundur kabupaten karimun.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jabarkan, Adapun suatu pertanyaan yang dapat di kemukakan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana kondisi marginalisasi suku laut dalam mengakses pekerjaan pasca kebijakan pembangunan di Kelurahan Paya Togok Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi marginalisasi suku laut dalam mengakses pekerjaan pasca kebijakan pembangunan di Kelurahan Paya Togok Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan dan membantu peneliti mempertajam ketajaman dalam menganalisis peristiwa yang relevan dalam lingkungan sosial dan meningkatkan analisis terkait pemahaman terhadap fenomena marginalisasi suku laut dalam pekerjaan dan teori yang digunakan yaitu eksklusi sosial.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan menambah wawasan kepada pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan rujukan bagi para peneliti mengenai marginalisasi suku laut dalam mengakses pekerjaan.